



**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA**

**BIRO PROTOKOL
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Biro Protokol tahun 2020.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi, program, dan kegiatan di lingkungan Biro Protokol 2020 yang mencakup uraian pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Protokol melalui serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh dua bagian di lingkungan Biro Protokol.



Laporan Kinerja ini juga dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja tahun anggaran 2020 serta sebagai acuan bagi peningkatan program kerja dengan melakukan langkah-langkah perbaikan melalui pelayanan yang lebih profesional dan transparan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas untuk pelaksanaan program kerja tahun berikutnya.

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kedua peraturan tersebut selanjutnya diinternalisasi ke dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel kepada seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Protokol tahun 2020. Selain itu, Laporan Kinerja ini diharapkan berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* dan juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada Sekretariat Jenderal DPR RI.

Semoga Laporan Kinerja Biro Protokol tahun 2020 ini dapat memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dalam upaya memberikan pelayanan kepada Deputi Administrasi secara khusus dan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Walaupun dalam masa pandemi Covid-19 yang terjadi dari awal tahun 2020, Laporan Kinerja ini dapat kami selesaikan. Karena itu kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukannya untuk penyempurnaan Laporan Kinerja ini.

Jakarta, Januari 2021
Biro Protokol,

Drs. Suratna, M.Si
NIP. 19640522 199103 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Biro Protokol 2020 merefleksikan pertanggungjawaban kinerja tahun 2020 dalam mencapai sasaran program/kegiatan yang diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dari sasaran program/kegiatan tersebut, Laporan kinerja Biro protokol berhasil mencapai target 100% (sangat baik). Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya dukungan Acara, Upacara dan Penyaluran Delegasi Masyarakat.

- Persentase pelayanan optimal terhadap penyelenggaraan urusan acara yang melaksanakan dukungan keprotokolan dalam acara Dewan, Setjen, dan BK DPR RI mencapai 100 persen (sangat baik) .
- Persentase pelayanan optimal terhadap penyelenggaraan urusan upacara dan penyaluran delegasi masyarakat yang melaksanakan dukungan keprotokolan dalam acara Dewan, Setjen, dan BKD mencapai 100 persen (sangat baik).

Keberhasilan dalam pencapaian sasaran Rencana Kinerja Biro Protokol Tahun 2020 ini didukung anggaran yang dialokasikan untuk Biro Protokol melalui kegiatan penyelenggaraan dukungan keprotokolan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal dengan nilai sebesar Rp.11.204.002.000,-. (sebelas miliar dua ratus empat juta dua ribu rupiah).

Laporan Kinerja Biro Protokol Tahun 2020 merupakan gambaran kinerja dari seluruh unit kerja di Biro Protokol yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan secara sistematis dengan indikator-indikator dan target-target yang ditentukan dan dilaksanakan selama tahun 2020.

Laporan Kinerja Biro Protokol ini juga merupakan sarana introspeksi dan evaluasi peningkatan kinerja pada periode tahun anggaran selanjutnya terhadap program dan kegiatan sesuai dengan realisasi anggaran agar lebih optimal sebagaimana capaian kinerja tahun 2020 sebesar 97,71 %.

Laporan ini diharapkan juga dapat digunakan sebagai media evaluasi untuk melihat efisiensi dan efektifitas pencapaian sasaran dari program dan kegiatan yang bermuara pada pencapaian visi dan misi Sekretariat Jenderal DPR RI. Sekaligus sebagai pertimbangan dalam perumusan Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, serta Rencana Kerja Anggaran pada periode tahun anggaran selanjutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB I.....	5
PENDAHULUAN	5
A. Umum.....	5
B. Struktur Organisasi.....	6
C. Permasalahan Strategis.....	9
BAB II.....	12
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024.....	12
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	12
BAB III	14
AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
A. Pengukuran Capaian Kinerja.....	14
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	17
1. Biro Protokol	18
2. Bagian Acara	18
3. Bagian Upacara dan Penyaluran Delegasi Masyarakat	24
C. Akuntabilitas Keuangan	32
BAB IV	35
P E N U T U P.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewajiban Setiap Instansi Pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Keputusan Kepala LAN-RI nomor 239/IX/6/8/2003, maka disusunlah Laporan Kinerja Biro Protokol Tahun 2020 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan Kinerja Biro Protokol Tahun 2020 ini merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja pencapaian sasaran program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020 yang diperjanjikan untuk dicapai pada akhir tahun 2020.

Laporan Kinerja ini disusun secara berjenjang dari 2 (dua) bagian di lingkungan Biro Protokol dengan cara membandingkan rencana/target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2020 dengan capaian target pada akhir tahun 2020, dengan tetap mengacu pada Renstra Deputy Administrasi Tahun 2020-2024 yang sejalan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 06 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah melalui perubahan pertama dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PER-SEKJEN/2016;

LKj Biro Protokol ini disusun secara komprehensif, objektif, jujur, akurat, dan transparan, sesuai dengan lingkup tanggungjawab, prioritas, dan manfaat bagi DPR RI maupun Sekretariat Jenderal DPR RI.

LKj ini disusun rutin setiap tahun dan disampaikan pada akhir tahun anggaran. LKj ini selain berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, juga dapat dijadikan bahan oleh Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam mengambil keputusan, utamanya dalam upaya peningkatan penyelenggaraan dukungan

keprotokolan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal DPR RI.

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan Biro Protokol dengan menerapkan beberapa ketentuan tersebut. Biro Protokol telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) dengan tujuan untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Biro Protokol yang baik.

SAKIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen yang berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan Biro Protokol yang akuntabel sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien, efektif, transparan dan responsif guna mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI.

LKj Biro Protokol Tahun 2020 disusun sebagai bentuk kewajiban Biro Protokol untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2020 sebagai perbaikan kinerja Biro Protokol di tahun 2021.

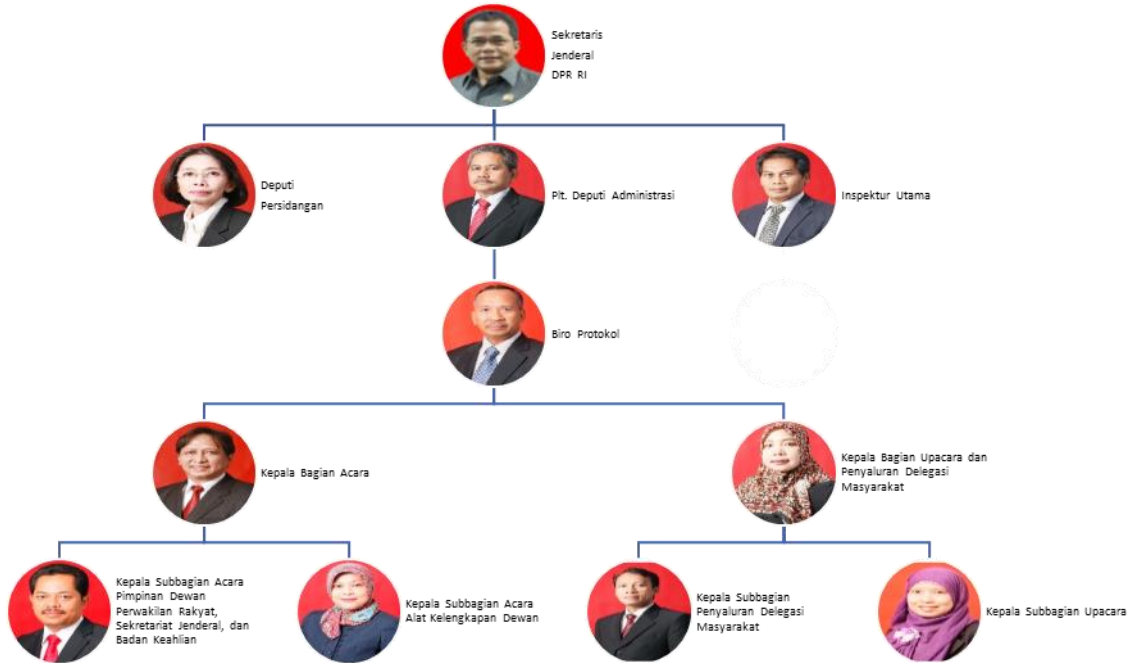
B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Republik Indonesia No. 06 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Republik Indonesia; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PER-SEKJEN/2016; bahwa Biro Protokol berada di bawah Deputi Administrasi.

Biro Protokol mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan keprotokolan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal DPR RI.

Adapun struktur organisasi Biro Protokol sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI



Biro Protokol dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Biro (Eselon II) yang membawahi 2 (dua) orang Eselon III, 4 (empat) orang Eselon IV dan 16 (Enam Belas) orang staf yang terbagi dalam 2 bagian yaitu :

1. Bagian Acara
2. Bagian Upacara dan Penyaluran Delegasi Masyarakat (PDM)

PNS BIRO PROTOKOL BERDASARKAN GOLONGAN

No	Satuan Kerja Biro Protokol	Golongan			Jumlah
		II	III	IV	
1	Kepala Biro			1	1
2	Acara	2	8	1	11
3	Upacara dan PDM	4	5	3	12
	Jumlah	6	13	5	24

Berdasarkan tabel di atas, PNS terbanyak adalah dari golongan III sejumlah 11 orang atau 50,00% selanjutnya dari Golongan II sebanyak 6 orang 27,27%, sisanya adalah dari golongan IV sejumlah 5 orang atau 22,72%.

TABLE PNS BIRO PROTOKOL BERDASARKAN PENDIDIKAN

No	Satuan Kerja Biro Protokol	Pendidikan				Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	
1	Kepala Biro	1				1
2	Acara	1	4	1	5	11
3	Upacara & PDM	4	2	-	6	12
	Jumlah	6	6	1	11	24

Berdasarkan tabel di atas, PNS di Biro Protokol terbanyak berpendidikan setingkat SLTA sejumlah 11 orang atau 45,83%, selanjutnya berpendidikan D3 sejumlah 1 orang atau 5, 16%, berpendidikan S1 sejumlah 6 orang atau 25,00%, kemudian S2 sejumlah 6 orang atau 25,00%.

Disamping Pegawai Negeri Sipil, Biro Protokol juga didukung dengan 55 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan rincian sebagai berikut :

1. PPNPN di Bandara Soekarno Hatta : 25 orang
2. PPNPN di Bandara Halim PK : 9 orang
3. PPNPN di AKD : 12 orang
4. PPNPN di Bagian Acara : 6 orang
5. PPNPN di Bagian Upacara & PDM : 3 orang

DAFTAR PPNPN BIRO PROTOKOL TAHUN 2020

UNIT PENEMPATAN KERJA	PENDIDIKAN TERAKHIR						JUMLAH
	S1		S2		D3		
	L	P	L	P	L	P	
BANDARA SOEKARNO HATTA	22	3					25
BANDARA HALIM PERDANA KUSUMA	7	1		1			9
AKD	9	2		1			12
BAGIAN ACARA	4	2					6
BAGIAN UPACARA & PDM	1	2					3
JUMLAH	43	10		2			55

Berdasarkan table di atas, dari 55 orang PPNPN Biro Protokol, terbanyak adalah PPNPN Laki-laki sejumlah 43 orang atau 76,35%, sisanya wanita sejumlah 12 orang atau 23,65% . Sementara berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas berpendidikan S1 sejumlah 53 orang atau 96,37%, selebihnya berdidikan S2 sebanyak 2 orang atau 3,63%.

C. Tugas dan Fugsi

DPR memiliki fungsi legislasi, Anggaran dan Pengawasan, dimana Anggota DPR Sebagai wakil rakyat wajib melaksanakan fungsi representasi dengan baik. Dengan demikian Anggota DPR wajib melaksanakan kegiatannya untuk menyerap, mengagregasi dan mengartikulasi kepentingan rakyat, sehingga Anggota DPR semakin dekat dengan Rakyat dan Konstituen didalam daerah pemilihannya. Sekretariat Jenderal DPR RI khususnya Biro Protokol didalam melaksanakan kegiatan keprotokolan dalam mendukung Anggota DPR sebagai Pejabat Negara yang memiliki hak keprotokolan yang melekat didalam kegiatannya seringkali berbenturan dengan Pelayanan Keprotokolan selaku Pejabat Negara.

Biro Protokol didalam melaksanakan tugas dan fungsinya menentukan :

1. Arah Kebijakan

Kebijakan Biro Protokol diarahkan kepada penyelenggaraan dukungan keprotokolan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal DPR RI dengan berorientasi kepada efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam memberikan dukungan keprotokolan.

2. Strategi Kebijakan

Untuk dapat mewujudkan arah kebijakan sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, maka disusunlah strategi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Protokol yaitu :

- a. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Protokol;
- b. Perumusan dan rencana kegiatan dan anggaran Biro Protokol;
- d. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Biro Protokol;
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang dukungan keprotokolan;
- f. Pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan keprotokolan;

- g. Pelaksanaan dukungan keprotokolan dalam acara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian, serta dukungan keprotokolan DPR RI di Bandara;
- h. Pelaksanaan dukungan keprotokolan dalam upacara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian;
- i. Pelaksanaan penyaluran delegasi masyarakat dan penyelenggaraan urusan logistik keprotokolan;
- j. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang Administrasi;
- k. Penyusunan laporan kinerja Biro Protokol; dan
- l. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang Administrasi.

Berdasarkan fungsi dan tugas Biro Protokol tersebut, maka untuk melaksanakan dukungan keprotokolan berdasarkan dua rencana kegiatan :

- 1. Acara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian, dukungan keprotokolan DPR RI di Bandara.
- 2. Upacara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian, serta pelaksanaan penyaluran delegasi masyarakat dan pelaksanaan urusan logistik keprotokolan.

D. Permasalahan Strategis

- 1. Masa pandemik covid-19 tahun 2020 yang mulai berlangsung pada awal tahun berdampak pada pelaksanaan layanan keprotokolan, sebagaimana pada pelaksanaan Rapat Paripurna DPR RI Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian RAPBN TA 2021 yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2020. Dalam pelaksanaan Rapat Paripurna tersebut terjadi perubahan terkait undangan yang hadir fisik dan virtual sehingga terjadi pula perubahan tata tempat pimpinan sidang dan tamu undangan VIP, serta pengaturan tempat duduk Anggota DPR RI yang hadir secara fisik. Selain itu, perubahan juga terjadi pada pengaturan Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan
- 2. Tahun 2020 merupakan awal periode keanggotaan Dewan masa bakti 2019 – 2024, sehingga dinamika tuntutan pelayanan keprotokolan masa keanggotaan periode 2019-2024 perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius Antara lain pendampingan keprotokolan pimpinan mulai dari acara diselenggarakan di dalam kantor, dalam kota, maupun yang dilaksanakan di luar kota. Layanan keprotokolan bandara kepada

Pimpinan dan Anggota DPR diharapkan dapat dilaksanakan di seluruh bandara Indonesia.

3. Melihat banyaknya cakupan tugas layanan protokol tersebut, biro protokol membutuhkan tambahan SDM baik kuantitas maupun kualitas guna memberikan layanan protokol untuk lebih optimal.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Rencana Strategis pada hakekatnya merupakan komitmen Biro Protokol beserta jajarannya mengenai upaya yang terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja melalui penyelenggaraan dukungan Keprotokolan yang optimal yang didasarkan pada penjabarannya dari kondisi internal dan eksternal dengan mengacu kepada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Dimana didalamnya terdapat Arah kebijakan DPR RI atas Tata Kelola kelembagaan DPR RI terkait Perumusan kebijakan internal dan pengawasan pelaksanaan kebijakan secara komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan, dengan strategi merumuskan dan/atau mengawasi kebijakan keprotokolan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian kinerja merupakan komitmen kepala unit kerja sebagai penerima amanah kepada atasannya dan kesepakatan antara penerima dengan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian kinerja dibuat berdasarkan Renstra, oleh karena itu Perjanjian Kinerja mencantumkan sasaran, indikator kinerja utama dan indikator lain yang relevan dan target kinerja yang akan dicapai dalam satu tahun melalui kegiatan dan anggaran yang disetujui pada tahun berjalan.

Dengan demikian, Perjanjian Kinerja Biro Protokol merupakan pernyataan komitmen Biro Protokol beserta jajarannya yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun anggaran.

Perjanjian Kinerja Biro Protokol berisikan penugasan dari Deputi Administrasi untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target. Melalui perjanjian kinerja yang menjadi tolak ukur sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 telah selaras dengan Rencana Kerja Tahun 2020 yang merupakan penjabaran dari rencana strategi Biro Protokol untuk mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan dalam sasaran kerja yang akan dicapai, sesuai Perjanjian Kinerja dan

alokasi anggaran Biro Protokol Tahun 2020 sebesar Rp. 11.204.002.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas dukungan Keprotokolan	1. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Keprotokolan 2. Presentase jumlah keluhan terhadap layanan keprotokolan 3. Presentase penyerapan anggaran Biro Protokol	3,20 20% 90%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi Biro Protokol yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Untuk membuktikan akuntabilitas kinerja, maka perlu dilakukan dengan pengukuran kinerja yang merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Biro Protokol.

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai, membandingkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja Biro Protokol.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Biro Protokol Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran, sehingga menggambarkan penilaian capaian kinerja sesuai dengan realisasi anggaran.

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah tercantum dalam Perjanjian Kinerja Biro Protokol. Dalam rangka capaian kinerja sesuai dengan amanat Permenpan RB No.14 tahun 2017, tetap dilakukan survei kepuasan pengguna terhadap pelayanan Biro Protokol Setjen DPR RI kepada Anggota DPR RI pada bulan Oktober-November tahun 2020 yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Setjen DPR RI terhadap 231 Anggota DPR RI.

Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas seluruh layanan yang diberikan Biro Protokol adalah sebesar 3,325 (83,134). Sementara target indeks kepuasan Anggota

sebesar 3,20. Dengan demikian, Biro Protokol dalam memberikan layanan keprotokolan melebihi dari target yang telah ditetapkan.

NO.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Relalisasi
1.	Meningkatnya kualitas dukungan Keprotokolan	1. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Keprotokolan 2. Presentase jumlah keluhan terhadap layanan keprotokolan 3. Presentase penyerapan anggaran Biro Protokol	3,20 20% 90%	3,325 1% 97,11%

Secara keseluruhan dalam mengukur tingkat capaian kinerja yang dimulai dengan menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja, pagu anggaran, realisasi anggaran dan capaian prosentase yang akan disandingkan dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 sebagai berikut :

No.	Program Utama	Sasaran	Indikator Kinerja <i>Output</i>		Indikator Kinerja <i>Outcome</i>	
			Uraian	Target	Uraian	Target
1	2	3	4	5	6	7
1.	Menyelenggarakan dukungan keprotokolan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian	Meningkatnya dukungan Acara dan Upacara dan Penyaluran Delegasi Masyarakat	a. Biro Protokol	1 Paket Kegiatan : perumusan Bahan Kebijakan Biro Protokol - LAKIP		100 %

No.	Program Utama	Sasaran	Indikator Kinerja <i>Output</i>		Indikator Kinerja <i>Outcome</i>	
			Uraian	Target	Uraian	Target
1	2	3	4	5	6	7

2.			<p>Bagian Acara</p> <p>meningkatkan kualitas pelayanan urusan acara yang melaksanakan dukungan keprotokolkan dalam acara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian</p>	<p>7 Paket Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan penerimaan tamu delegasi parlemen luar negeri yang akan mengunjungi Indonesia sebagai tamu resmi Pimpinan DPR RI dan BKSAP DPR RI di Jakarta. 2. Penyelenggaraan penerimaan tamu delegasi parlemen luar negeri yang akan mengunjungi Indonesia sebagai tamu resmi Pimpinan DPR RI dan BKSAP DPR RI di Daerah. 3. Penyelenggaraan penerimaan tamu delegasi sekretariat parlemen luar negeri yang akan mengunjungi Indonesia sebagai tamu resmi Sekjen DPR RI di Jakarta. 4. Pengurusan VIP Room. 5. Peningkatan profesionalisme dan pelayanan Protokol DPR RI. 6. Pendampingan kegiatan Pimpinan DPR RI. 7. Penyelenggaraan Supervisi Kegiatan 	<p>Persentase pelayanan optimal terhadap penyelenggaraan urusan acara yang melaksanakan dukungan keprotokolkan dalam acara Dewan, Setjen, dan BK DPR RI</p>	100 %
----	--	--	---	--	---	-------

				Protokol di Alat Kelengkapan Dewan.		
--	--	--	--	-------------------------------------	--	--

No.	Program Utama	Sasaran	Indikator Kinerja <i>Output</i>		Indikator Kinerja <i>Outcome</i>	
			Uraian	Target	Uraian	Target
1	2	3	4	5	6	7
3.			c. Upacara dan Penyaluran Delegasi Masyarakat meningkatnya kualitas pelayanan urusan upacara dan penyaluran delegasi masyarakat yang melaksanakan dukungan keprotokolkan dalam acara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian	6 Paket Kegiatan : 1. Rapat Paripurna DPR RI Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Penyampaian RAPBN. 2. Sidang Bersama DPR dan DPD dalam rangka HUT RI 3. Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka HUT DPR RI 4. Pelantikan Anggota DPR dan Pejabat Setjen dan BK DPR RI 5. Kegiatan Protokoler Dewan dan Setjen Lainnya: (Persemayaman, Upacara Bendera, Kegiatan Setjen dan Dewan) 6. Kegiatan Penerimaan dan Penyaluran Delegasi Masyarakat	Persentase pelayanan optimal terhadap penyelenggaraan urusan upacara dan penyaluran delegasi masyarakat yang melaksanakan dukungan keprotokolkan dalam acara Dewan, Setjen, dan BK DPR RI	100

B. Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Biro Protokol tahun 2020 dengan mengacu kepada program dan kegiatan sebagaimana tertuang pada tabel diatas, maka untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja jajaran Biro

Protokol dengan membandingkan capaian di tahun 2019 dan di tahun 2020, yaitu sebagai berikut :

1. Biro Protokol

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2019			CAPAIAN 2020		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Paket Kegiatan perumusan Bahan Kebijakan Biro Protokol.	1.272.220.000	1.074.754.300	84,48	1.163.981.000	1.118.042.200	96,05

Dalam perumusan kebijakan Biro Protokol, melihat realisasi di tahun 2019 sebesar 84,48% dan capaian realisasi tahun 2020 sebesar 96,05%. dengan demikian adanya peningkatan sebesar 11,57%.

2. Bagian Acara

Bagian Acara dalam rangka melaksanakan dukungan supporting sistem kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang keprotokolan, penyelenggaraan Acara Parlemen, serta dukungan keprotokolan pada tahun anggaran 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 7.201.295.000,- (Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah), dimana alokasi anggaran sebesar Rp 1.918.522.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) diterima melalui Anggaran Belanja Tambahan pada bulan Juli tahun 2020. Jika dibandingkan dengan alokasi tahun anggaran 2019, anggaran tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 5.002.860.000,-.

Capaian realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp **7.045.594.155,-** (Tujuh Milyar Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Lima Rupiah) atau sebesar **97,84%** atau meningkat **17,02%** dari realisasi tahun anggaran 2019.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2019			CAPAIAN 2020		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%

1	2	3	4	5	6	7	8
	BAGIAN ACARA 7 Paket Kegiatan	12.204.155.000	9.958.263.676	81,60	7.201.295.000	7.045.594.155	97,84

Capaian realisasi tahun anggaran 2020 meliputi beberapa program kegiatan :

1. Penyelenggaraan Penerimaan Tamu Delegasi Parlemen Luar Negeri yang akan mengunjungi Indonesia sebagai tamu resmi Pimpinan DPR RI dan BKSAP DPR RI di Jakarta.

Sehubungan dengan terjadinya pandemi COVID-19 tidak ada kunjungan delegasi, maka alokasi anggaran yang diterima dari APBN dan dari ABT dilakukan revisi untuk kegiatan peningkatan Profesionalisme dan Pelayanan Protokol DPR RI dan pengadaan peralatan kesehatan pencegahan pandemi COVID-19

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2019			CAPAIAN 2020		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Penyelenggaraan penerimaan tamu delegasi parlemen luar negeri yang akan mengunjungi Indonesia sebagai tamu resmi Pimpinan DPR RI dan BKSAP DPR RI di Jakarta.	1.146.300.000	711.191.179	62,04	35.431.000	35.392.500	99,89

Realisasi di tahun 2019 sebesar 62.04% sementara capaian realisasi tahun 2020 menjadi 99,89%, setelah dilakukan revisi.

2. Penyelenggaraan penerimaan tamu delegasi parlemen luar negeri yang akan mengunjungi Indonesia sebagai tamu resmi Pimpinan DPR RI dan BKSAP DPR RI di Daerah.

Program kegiatan kunjungan Delegasi Parlemen ke daerah terkait dengan program kunjungan delegasi di Jakarta, karena pandemic COVID-19 program ini juga tidak dapat terlaksana. Anggaran yang tersedia juga dilakukan revisi untuk kegiatan peningkatan Profesionalisme dan Pelayanan Protokol DPR RI dan pengadaan peralatan kesehatan pencegahan pandemi COVID-19.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2019			CAPAIAN 2020		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 Penyelenggaraan penerimaan tamu delegasi parlemen luar negeri yang akan mengunjungi Indonesia sebagai tamu resmi Pimpinan DPR RI dan BKSAP DPR RI di Daerah.	252.934.000	58.918.600	23,29	188.000.000 (ABT)		

Realisasi di tahun 2019 sebesar 23,29% untuk tahun 2020 tidak ada kegiatan kunjungan tamu resmi ke daerah karena masa pandemi COVID-19.

3. Penyelenggaraan penerimaan tamu delegasi sekretariat parlemen luar negeri yang akan mengunjungi Indonesia sebagai tamu resmi Sekjen DPR RI di Jakarta.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2019			CAPAIAN 2020		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	3. Penyelenggaraan penerimaan tamu delegasi sekretariat parlemen luar negeri yang akan mengunjungi Indonesia sebagai tamu resmi Sekjen DPR RI di Jakarta.	18.980.000	18.285.000	96,34			

Pada indikator kinerja kegiatan penyelenggaraan penerimaan tamu delegasi sekretariat parlemen luar negeri yang akan mengunjungi Indonesia sebagai tamu resmi Sekjen DPR RI di Jakarta untuk tahun anggaran 2020, kegiatan ini tidak mendapatkan alokasi anggaran.

4. Pengurusan VIP Room

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2019			CAPAIAN 2020		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8

	4. Pengurusan VIP Room.	185.568.000	144.882.000	78.07	29.650.000	9.300.000	31,37
--	-------------------------	-------------	-------------	-------	------------	-----------	-------

Realisasi di tahun 2019 sebesar 78,07% sementara capaian realisasi tahun 2020 menjadi **31,37%**. Menurunnya pagu anggaran VIP dikarenakan adanya dana operasional VIP sudah terakomodasi pada Mata Anggaran Tata Usaha Pimpinan DPR RI masing-masing, sedangkan anggaran di Bagian Acara dialokasikan untuk kegiatan perjalanan dinas.

Pelaksanaan Kegiatan Pengurusan VIP :

Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	Total
Jumlah	13	8	-	-	-	-	-	3	1	4	8	7	44

Pelaksanaan Kegiatan Pengurusan VIP mulai bulan Maret sampai dengan Juli 2020 tidak ada kegiatan karena adanya pandem COVID-19. Kegiatan Pengurusan VIP dimulai dari pengurusan surat ijin penggunaan ruangan VIP Room, baik di Bandara Soekarno Hatta maupun Bandara Halim Perdana Kusuma kepada Kepala Sekretariat Negara Republik Indonesia untuk Pimpinan DPR RI. Berdasarkan surat ijin ini selanjutnya petugas protokol melakukan koordinasi dengan bagian *Office In Charge* (OIC) Bandara, untuk mengurus surat penggunaan VIP beserta fasilitas yang diperlukan. Kegiatan Pimpinan DPR RI melalui VIP bandara adalah dalam rangka kunjungan kerja ke daerah maupun kenjungan/muhibah ke luar negeri.

5. Peningkatan profesionalisme dan pelayanan protokol DPR RI.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2019			CAPAIAN 2020		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	5. Peningkatan profesionalisme dan pelayanan Protokol DPR RI.	10.261.973.000	8.760.716.897	85.37	5.075.385.000	5.042.273.314	99,35

Realisasi di tahun 2019 sebesar 85,37% sementara capaian realisasi tahun 2020 mencapai **99,91%**, yaitu adanya peningkatan sebesar 14,54%.

Dalam rangka Peningkatan Profesionalisme Layanan Keprotokolan kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI, dilakukan beberapa program kegiatan, antara lain :

- a. *Upgrade* pengetahuan keprotokolkan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil/PPNANS Biro Protokol, dengan mengundang Narasumber Keprotokolkan dan pelaksanaan Bimbingan Teknis Keprotokolkan.
- b. Pengadaan pakaian dan sepatu pegawai protokol, hal ini diharapkan agar *performance* petugas protokol selalu terjaga kerapiannya.
- c. Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ke-Dua dalam rangka memberikan layanan keprotokolkan di bidang layanan *Lounge* dan layanan Kedatangan dan kepulangan, baik di bandara di Jakarta maupun di bandara daerah. Perjanjian kerjasama tersebut antara lain :
 - 1) PT. Garuda Indonesia meliputi layanan check-in premium, layanan business class lounge, dan layanan jalur khusus pada security check point di terminal 3 Bandara Soekarno Hatta.
 - 2) PT. Bumi Liputan Jaya (Blue Sky) di terminal 2 Bandara Soekarno Hatta.
 - 3) KSO Angkasa Pura Solusi Trikama Boga (Saphire Lounge) di Terminal 2 Internasional Bandara Soekarno Hatta
 - 4) Koperasi Karyanan PT. Angkasa Pura II (Persero) Satya Ardhia di Bandara Halim Perdana Kusuma, meliputi layanan lounge, Penjemputan dan pengantara dari dan ke pesawat, dan jalur khusus.
 - 5) PT. Gapura Angkasa kerjasama di bandara daerah dengan ruang lingkup, layanan penjemputan dan pengantaran, check-in, bagasi, dan lounge. Kerjasama di bandara daerah tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019, semula kerjasama di 16 bandara daerah menjadi 24 bandara.

Kegiatan layanan keprotokolkan di bandara berdasarkan satuan kegiatan dapat di jelaskan sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan Keprotokolkan di Bandara (satuan kegiatan):

Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	Jumlah
Bandara Soetta	430	560	243	3	17	69	131	154	202	268	451	263	2.801
Bandara Halim PK	168	277	140	19	2	0	68	48	52	64	60	59	957
T O T A L													3.758

Sedangkan kegiatan layanan keprotokolkan di bandara berdasarkan jumlah layanan dengan saatuan pack/perorang, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jumlah Layanan Keprotokolan di Bandara (satuan pack/orang) :

Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	Jumlah
Bandara Soetta	1.640	2.318	744	20	24	112	313	414	468	919	1.897	1.007	9.876
Bandara Halim PK	291	427	222	25	18	31	104	98	115	173	140	93	1.737
T O T A L													11.613

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan jasa layanan keprotokolan kepada anggota Dewan di 24 bandara tersebut, maka dilakukan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah dan pihak PT. Garuda Angkasa di daerah.

6. Pendampingan Kegiatan Pimpinan DPR RI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2019			CAPAIAN 2020		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	6.Pendampingan kegiatan Pimpinan DPR RI.	166.680.000	165.135.000	99,07	320.400.000	289.475.000	90,35

Pagu Anggaran Tahun 2020 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 320.400.000,-. Realisasi di tahun 2019 sebesar 99,07% sementara capaian realisasi tahun 2020 menjadi **90,35%**, yaitu adanya penurunan sebesar **8,72%**. Peningkatan ini didapatkan dari pelaksanaan pendampingan kegiatan Pimpinan DPR RI di dalam kota, pendampingan kegiatan di Jawa Barat (tidak menginap), dan pendampingan kegiatan di luar kota.

Pendampingan keprotokolan kegiatan Pimpinan DPR RI dilaksanakan untuk memberikan kepastian tata penghormatan, tata upacara, dan tata tempat pada pelaksanaan acara. Di samping hal tersebut, pendampingan keprotokolan juga untuk memastikan pelaksanaan kegiatan Pimpinan DPR RI berjalan dengan lancar. Kegiatan pendampingan keprotokolan kepada Pimpinan DPR RI selama tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pendampingan Kegiatan Pimpinan DPR RI :

Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	Total
Pendampingan Dalam Kota/ Jumlah	20	51	27	1	7	10	29	45	42	59	48	11	350

Pendampingan Jawa Barat/ Jumlah	6	5	7	0	0	0	11	29	14	18	13	2	101
Pendampingan Luar Kota/ Jumlah	1	1	0	0	0	0	0	0	10	7	1	0	20

7. Penyelenggaraan Supervisi Kegiatan Protokoler di Alat Kelengkapan Dewan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2019			CAPAIAN 2020		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Penyelenggaraan supervisi kegiatan protokoler di Alat Kelengkapan Dewan.	171.720.000	99.135.000	57,73	101.557.000	101.239.000	99,69

Pagu anggaran tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 70.163.000,- (Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) dari tahun anggaran 2019. Realisasi serapan anggaran tahun 2019 sebesar 57,73% dan realisasi serapan anggaran tahun 2020 menjadi 99,69%.

3. Bagian Upacara dan Penyaluran Delegasi Masyarakat

Bagian Upacara dan Penyaluran Delegasi Masyarakat (PDM) pada tahun 2020 dalam melaksanakan dukungan keprotokolan pada kegiatan : Upacara Kenegaraan, DPR RI, Setjen dan BK, pelaksanaan penyaluran delegasi masyarakat dan pelaksanaan pengurusan logistik keprotokolan, mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 2.838.726.000,- untuk program dan kegiatan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2019			CAPAIAN 2020		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>BAGIAN UPACARA DAN PDM</u> 7 Paket Kegiatan :	5.672.234.000	5.100.875.446	89,93	2.838.726.000	2.716920.842	95,71

Pencapaian realisasi di tahun 2019 sebesar 89,93% dan tahun 2020 sebesar **95,71%**, mengalami peningkatan sebesar **5,78%** dari tahun sebelumnya. Pagu Anggaran Tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Pagu Anggaran Tahun 2019.

Adapun rincian kegiatan dan realisasi capaian anggaran sebagai berikut :

1. Rapat Paripurna DPR RI Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian RAPBN TA 2021.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2019			CAPAIAN 2020		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Rapat Paripurna DPR RI Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Penyampaian RAPBN TA 2021.	1.239.606.000	1.185.940.655	95,67	807.698.000	788.358.500	97,61



Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 95,67%, capaian realisasi anggaran tahun 2020 sebesar 97,61 % terjadi peningkatan realisasi anggaran sebesar 1,94 %. Dengan rangkaian kegiatan Pidato Presiden ini bersamaan harinya dengan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, maka susunan acara menjadi padat dan jeda waktu istirahat yang singkat. Namun kegiatan tersebut berjalan lancar tanpa adanya *complain* dari Pimpinan DPR/Anggota DPR atau mitra kerja yang hadir. Untuk melaksanakan acara kegiatan tersebut Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR selalu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 667);

Kegiatan Sidang Tahun 2020 sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di karenakan pandemi Virus Covid-19 maka untuk menjaga protokol kesehatan perlu diterapkan *Physical distancing* sehingga kegiatan sidang Pidato Presiden dihadiri oleh sepertiga dari undangan normal. Undangan Fisik hanya terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, Ketua dan Wakil Lembaga Negara, Ketua dan Sekretaris fraksi, Pimpinan dan Kapoksi AKD, Perwakilan Provinsi Anggota DPD, Menko, Mensesneg, Menteri Keuangan, Menteri PPN/Ka. Bapenas dan Seskab, Panglima TNI, Kapolri dan Ketum Parpol dan undangan lainnya menggunakan jalur *Virtual Zoom*. Korps Musik Mabes POLRI yang mengiringi lagu Indonesia Raya, Mengheningkan Cipta dan memainkan lagu-lagu perjuangan dibatasi menjadi 24 personel.

2. Sidang Bersama DPR dan DPD dalam rangka HUT RI tanggal 16 Agustus 2020.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2019			CAPAIAN 2020		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. Sidang Bersama DPR dan DPD dalam rangka HUT RI tanggal 14 Agustus 2020.	325.220.000	265.870.000	81.75	392.843.000	373.985.000	95,20



Pagu Anggaran Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2020 terdiri dari belanja bahan, honor output kegiatan, dan belanja jasa lainnya.

Realisasi di tahun 2019 sebesar 81.75%, capaian realisasi anggaran tahun 2020 sebesar 95,20 % dengan selisih kenaikan sebesar 13,45 % disebabkan karena pada tahun 2020 yang menjadi Tuan Rumah pelaksana kegiatan Sidang Bersama adalah DPR RI. Acara Sidang Bersama diselenggarakan setiap tahun dan secara bergantian oleh DPR dan DPD. Kegiatan Pidato Kenegaraan Sidang Bersama tahun ini diselenggarakan secara bersamaan dengan Sidang Tahunan MPR.

3. Rapat Paripurna HUT DPR RI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2019			CAPAIAN 2020		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	3.Rapat Paripurna HUT DPR RI tanggal 29 Agustus 2020.	465.462.000	454.519.500	97.65	146.620.000	140.145.000	95,58

Realisasi di tahun 2019 sebesar 97,65%, sementara capaian realisasi tahun 2020 sebesar 95,58 % yaitu adanya selisih penurunan sebesar 2,07 %.

Dengan rangkaian kegiatan Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka Hari Ulang Tahun DPR RI ke-75 dengan agendanya mendengarkan Pidato Ketua DPR RI dan penyerahan Buku Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2019-2020, yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2020. Laporan Buku Kinerja diserahkan oleh Ketua DPR didampingi para Wakil Pimpinan DPR kepada para Ketua Fraksi.

Physical distancing juga diterapkan pada acara ini, Acara ini hanya dihadiri oleh Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi, Komisi, AKD dan Kapoksi dan susunan acara berbeda yaitu dengan tidak adanya pemotongan tumpeng seperti yang dilakukan ditahun sebelumnya. Sedangkan Anggota DPR, Pimpinan MPR dan DPD, Mantan Pimpinan DPR, Ketua Lembaga Negara, Mantan Eselon I DPR, Sekjen AIPA di undang melalui jalur Virtual Zoom.

4. Pelantikan Anggota DPR dan Pejabat Setjen dan BK DPR

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2019			CAPAIAN 2020		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	4.Pelantikan Anggota DPR dan Pejabat Setjen dan BK DPR.	221.160.000	134.635.000	60.88	138.000.000	123.165.000	89,25



Pagu Anggaran pelantikan Anggota DPR dan pejabat Setjen dan BK DPR Tahun 2020 terdiri dari belanja bahan, dan belanja jasa profesi.

Realisasi di tahun 2019 sebesar 60,88% sementara capaian realisasi tahun 2020 sebesar **89,25 %**, mengalami kenaikan sebesar **28,37 %**.

5. Kegiatan Protokoler lainnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2019			CAPAIAN 2020		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	5.Kegiatan Protokoler Lainnya.	497.016.000	409.479.291	82,39	356.469.000	347.504.342	97,49



Pagu Anggaran Kegiatan Protokoler lainnya Tahun 2020 terdiri dari belanja bahan, honor output kegiatan, dan belanja jasa lainnya.

Realisasi di tahun 2019 sebesar 82,39% sementara capaian realisasi tahun 2020 sebesar **97,49 %**, mengalami kenaikan sebesar **15,1%**.

6. Kegiatan Penerimaan dan Penyaluran Delegasi Masyarakat.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2019			CAPAIAN 2020		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Kegiatan Penerimaan dan Penyaluran Delegasi Masyarakat.	1.707.540.000	1.651.606.000	96,72	605.220.000	562.740.000	92,98

Pagu Anggaran Kegiatan Penerimaan dan Penyaluran Delegasi Masyarakat Tahun 2020 terdiri dari belanja barang operasional, penanganan pandemi covid-19, belanja bahan, belanja barang non operasional penanganan pandemic covid-19, dan belanja perjalanan dinas.

Realisasi di tahun 2019 sebesar 96,72% sementara capaian realisasi tahun 2020 sebesar 92,98% mengalami penurunan sebesar 3.74%, penurunan secara presentasi maupun pagu anggaran pada tahun ini disebabkan kondisi pandemi yang tidak memungkinkan untuk menerima tamu delegasi di ruang khusus penerimaan aspirasi delegasi masyarakat.

Sementara Anggaran Kegiatan Penerimaan dan Penyaluran Delegasi Masyarakat (BA BUN) dipergunakan untuk belanja bahan (jamuan delegasi dan pengadaan perlengkapan sosialisasi penyaluran aspirasi).

Dibawah ini digambarkan kunjungan delegasi masyarakat mulai bulan Januari s.d. Desember 2020 :

**REKAPITULASI DELEGASI MASYARAKAT DPRD/AUDENSI/UNRAS
Bagian Upacara dan Penyaluran Delegasi Masyarakat Tahun 2020**

NO	BULAN	JUMLAH
1.	JANUARI	11.390 Orang.
2.	FEBRUARI	6.682 Orang.
3.	MARET	1.120 Orang.
4.	APRIL	- Orang.
5.	MEI	- Orang.
6.	JUNI	103 Orang.
7.	JULI	6.989 Orang.
8.	AGUSTUS	22.122 Orang.
9.	SEPTEMBER	1.759 Orang.
10.	OKTOBER	5.016 Orang.
11.	NOVEMBER	86 Orang.
12.	DESEMBER	192 Orang.
	JUMLAH TOTAL	49.658
Orang.		

C. Akuntabilitas Keuangan

Gambaran terhadap indikator kinerja keuangan dalam capaian tahun 2019 yang disandingkan dengan capaian tahun 2020 sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

1	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2019			CAPAIAN 2020		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 Paket Kegiatan : perumusan Bahan Kebijakan Biro Protokol. - LAKIP 2019	1.233.366.000	1.106.854.200	89.74	1.163.981.000	1.118.042.200	96.05
	<u>BAGIAN ACARA</u> 7 Paket Kegiatan :	9.074.701.000	6.829.522.207	75.26	7.201.295.000	7.045.594.155	97.84
	1. penyelenggaraan penerimaan tamu delegasi parlemen luar negeri yang akan mengunjungi Indonesia sebagai tamu resmi Pimpinan DPR RI dan BKSAP DPR RI di Jakarta.	1.004.020.000	448.765.000	44.70	35.431.000	35.392.500	99,89
	2. penyelenggaraan penerimaan tamu delegasi parlemen luar negeri yang akan mengunjungi Indonesia sebagai tamu resmi Pimpinan DPR RI dan BKSAP DPR RI di Daerah.	233.299.000	151.120.929	64.78	188.000.000 (ABT)		
	3. penyelenggaraan penerimaan tamu						

1	INDIKATOR	CAPAIAN 2019			CAPAIAN 2020		
	KINERJA	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
2	3	4	5	6	7	8	
	delegasi sekretariat parlemen luar negeri yang akan mengunjungi Indonesia sebagai tamu resmi Sekjen DPR RI di Jakarta.	193.340.000	67.545.000	34.94			
	4. pengurusan VIP Room.	138.000.000	85.450.000	61.92	29.650.000	11.700.000	39,46
	5. peningkatan profesionalisme dan pelayanan Protokol DPR RI.	7.300.212.000	5.892.514.278	80.72	6.714.257.000	6.630.040.255	98,75
	6. Pendampingan kegiatan Pimpinan DPR RI.	91.350.000	83.657.000	91.58	320.400.000	320.165.000	99,93
	7. Penyelenggaraan supervisi kegiatan protokoler di Alat Kelengkapan Dewan.	114.480.000	100.470.000	87.76	101.557.000	101.239.000	99,69
	<u>BAGIAN UPACARA</u>	5.672.234.000	5.100.875.446	89.93	2.838.726.000	2.706.125.842	95,33
	<u>DAN</u>						
	<u>PDM</u>						
	7 Paket Kegiatan :						
	1. Rapat Paripurna DPR RI Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Penyampaian RAPBN	1.239.606.000	1.185.940.655	95.67	807.698.000	788.358.500	97,61

	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2019			CAPAIAN 2020		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. Sidang Bersama DPR dan DPD dalam rangka HUT RI tanggal 14 Agustus 2020	325.220.000	265.870.000	81,75	392.843.000	373.985.000	95,20
	3. Rapat Paripurna DPR RI tanggal 29 Agustus	465.462.000	454.519.500	97,65	146.620.000	140.145.000	95,58
	4. Pelantikan Anggota DPR dan Pejabat Setjen dan BK DPR.	221.160.000	134.635.000	60,88	138.000.000	123.965.000	89,83
	5. Kegiatan Protokoler Dewan dan Setjen Lainnya (Persemayaman, Upacara Bendera, Kegiatan Setjen dan Dewan).	497.016.000	409.479.291	82,39	356.469.000	322.271.342	90,41
	6. Kegiatan Penerimaan dan Penyaluran Delegasi Masyarakat.	1.707.540.000	1.651.606.000	96,72	997.096.000	957.401.000	96,02

BAB IV

P E N U T U P

Penyampaian Laporan Kinerja Biro Protokol Tahun 2020 merupakan bentuk akuntabilitas pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi, serta tujuan Biro Protokol beserta unit kerja di bawahnya untuk mengukur, mengevaluasi, dan menganalisis capaian kinerja yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran

Secara umum penetapan tujuan, sasaran, dan kegiatan Biro Protokol Tahun 2020 dapat terlaksana dengan baik, namun demikian pelaksanaan kegiatan tersebut masih perlu ditingkatkan guna merespon tuntutan Dewan dan Sekretariat Jenderal DPR RI yang semakin tinggi.

Dalam mewujudkan pelayanan keprotokolan yang profesional Biro Protokol mengalami berbagai kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, namun kondisi ini dapat diantisipasi dengan baik, melalui koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang ada.

Untuk lebih mengoptimalkan pelayanan keprotokolan kepada Dewan dan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI di tahun 2020, Biro Protokol akan melakukan beberapa strategi, diantaranya:

1. Meningkatkan komitmen antar unit di lingkungan Biro Protokol
2. Mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya manusia dan anggaran melalui kegiatan yang berorientasi pada *outcome* sehingga pelayanan keprotokolan yang profesional bisa langsung dirasakan oleh Dewan, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Laporan kinerja ini harus menjadi pendorong kinerja sekaligus evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja, baik kinerja perorangan maupun kinerja organisasi dan kinerja keuangan dengan menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dan mengantisipasi perubahan-perubahan kebijakan Biro Protokol.